

PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN

e-ISSN: 2621-8119

DOI: <https://doi.org/10.46774/pptk.v7i2.585>

Analisis Hegemoni Negara Dalam Gotong Royong Masyarakat Untuk Pembangunan Desa

Elisabeth Date Masan Welin¹, Kristianus Simon H. Molan², Yohanes K. Ethelbert³

¹⁻³Administrasi Publik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Provinsi NTT, Indonesia

* Korespondensi Penulis: Phone : +6282359404477, alamat email: elisabethdmwelin@unwira.ac.id

ABSTRACT

Diterima : 1 September 2025

Direvisi : 18 Desember 2025

Diterbitkan : 30 Desember 2025



This is an open access article under the CC BY-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PPTK is indexed Journal and accredited as Sinta 4 Journal (<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7050>)

This research aims to analyze state intervention through village government within the framework of Antonio Gramsci's hegemony theory, focusing on the dynamics of communal solidarity (gotong royong) in Kenotan Village, Adonara Tengah District, East Flores. The study investigates how state hegemony is exercised in village development, whether traditional practices of gemohing persist or change, and the extent of community participation in the development process. A qualitative method with a case study approach was applied, using in-depth interviews, observation, and documentation. The findings show that the state plays an active role through regulations and village funds, which have supported infrastructure development and improved welfare. However, the introduction of daily wages (HOK) within village programs has shifted the meaning of gotong royong from voluntary communal work to semi-formal participation linked to financial incentives. While gemohing still exists in self-organized community activities outside state programs, its role in official projects has declined. The study concludes that state hegemony produces positive impacts, particularly in infrastructure provision, but also weakens the traditional values of social capital. Therefore, integrating state development policies with local cultural traditions is essential to ensure sustainable village development.

Keywords: Hegemony, Communal Solidarity, Village Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi negara melalui pemerintah desa dalam kaitan dengan teori hegemoni Antonio Gramsci, dengan fokus pada dinamika gotong royong masyarakat Desa Kenotan, Kecamatan Adonara Tengah, Flores Timur. Tujuan penelitian adalah menilai bentuk hegemoni negara dalam pembangunan desa, menelaah sejauh mana tradisi gotong royong (*gemohing*) tetap bertahan atau mengalami perubahan, serta menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara hadir melalui regulasi dan dana desa yang berdampak pada peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan. Namun, pemberian upah harian (HOK) dalam program pembangunan menyebabkan pergeseran makna gotong royong dari kerja sukarela menjadi kegiatan semi-formal yang terikat pada insentif. Tradisi *gemohing* masih dipraktikkan secara swadaya di luar program pemerintah, namun semakin berkurang dalam kegiatan pembangunan resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hegemoni negara membawa dampak positif berupa pembangunan desa, tetapi juga negatif karena melemahkan nilai sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan pembangunan dengan pelestarian budaya lokal sangat penting untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata kunci: Hegemoni, Gotong Royong, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsesus ketimbang melalui penindasan terhadap klas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Nezar and Andi 2003).

Gramsci merumuskan konsepnya yang merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dalam terminologinya ‘momen’, dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang: dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari ‘roh’ ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai klas diktator (Williams, 1960;587) (Nezar and Andi 2003).

Salah satu budaya Masyarakat Flores Timur adalah Gemohing. Gemohing merupakan kerja sama gotong-royong dalam sebuah ikatan kelompok kerja yang ditujukan untuk membantu seorang pemilik kebun membersihkan atau mengerjakan lahan pertaniannya, yang dijalankan secara berkelanjutan untuk tiap-tiap anggota kelompok. Gemohing pada awalnya terbentuk atas dasar ikatan kelompok dalam mengerjakan atau membersihkan kebun bersama secara bergilir namun sejalan dengan berkembangnya waktu gemohing tumbuh menjadi modal sosial dan berkembang menjadi modal politik. Nilai yang terkandung dalam gemohing adalah solidaritas, kekerabatan dan kekeluargaan (Payong 2021).

Dalam konteks pembangunan desa, hegemoni negara sering kali berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, namun di sisi lain, budaya lokal seperti gotong royong (gemohing) tetap menjadi fondasi utama masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri. Konsep hegemoni negara yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci menunjukkan bahwa negara tidak hanya menggunakan kekuatan koersif, tetapi juga membentuk dominasi melalui konsensus dan nilai-nilai yang diinternalisasi oleh masyarakat, termasuk dalam proyek-proyek pembangunan desa (Nezar and Andi 2003). Namun, apakah kehadiran negara melalui program pembangunan memberdayakan masyarakat atau justru melemahkan semangat gotong royong yang telah lama menjadi tradisi? Untuk menjawab pertanyaan ini maka peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hegemoni Negara dalam Gotong Royong Masyarakat untuk Pembangunan Desa”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk hegemoni negara dalam gotong royong masyarakat pada proses pembangunan desa di Desa Kenotan? Dengan adanya rumusan masalah ini maka diharapkan mampu menjawab hasil dari penelitian yang dimaksud oleh peneliti.

State of the art dan Kebaruan

Beberapa penelitian yang relevan yang pernah dilakukan untuk dikemukakan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Zezen Zaenudin Ali (2017) dengan judul: Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) Di Italia mengenai hegemoni satu kelompok atas kelompok lainnya menurut Gramsci bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan diraih melalui upaya politis, kultural, dan intelektual. Penelitian ini menjelaskan bagaimana ideologi menjadi instrumen dominasi yang memberi legitimasi kepada kelompok penguasa

(Zaenudin Ali 2017). Penelitian kedua oleh Isman Ridwan (2019) dengan Judul: Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih: Pasang Surut Kekuasaan Adat di Tengah Hegemoni Negara membahas Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih masih diakui melalui Perda Kab. Bungo No. 6 Tahun 2006. Kekuasaan adat tetap dipegang oleh Datuk Sinaro Putih, sementara pemerintahan umum berada di bawah Datuk Rio. Upaya mempertahankan eksistensi dilakukan melalui peraturan desa, acara adat, dan perlindungan hutan adat dari eksploitasi (Ridwan 2019). Ketiga oleh Endah Siswati (2017) "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci". Gramsci meyakini bahwa masyarakat sosialis yang ideal hanya dapat tercapai jika kaum proletar memiliki kesadaran yang memadai terhadap kondisi sosial dan mampu mengorganisir diri. Revolusi tidak akan terjadi selama proletar masih terhegemoni oleh kelas borjuis. Konsensus, perjuangan politik, dan pendidikan ideologis diperlukan agar kelas pekerja dapat menjadi kelas hegemonik (Siswati 2017). Keempat oleh Oktavianus Daluamang Payong (2021) "Politik Gemohing: Instrumen Meraih Kekuasaan Politik di Kabupaten Flores Timur", penelitian ini bertujuan untuk memahami budaya lokal yang dijadikan sebagai strategi dalam memenangkan dan mempertahankan kekuasaan politik. Gemohing merupakan budaya Masyarakat Flores Timur. Gemohing adalah budaya gotong royong masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gemohing sangat berpengaruh dalam kemenangan empat kali RRK lama Pemilu Legislatif dan menjadi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi *multi-situs*) atau kasus Tunggal (studi *dalam-situs*) (Creswell 2002). Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu (1) menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan (2) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Anggitto, Albi & Setiawan, and Johan 2018).

orang kuat lokal di Flores Timur. Politik gemohing yang dilakukan oleh RRK adalah dengan membentuk kelompok di basis pemilihannya, selalu mengunjungi masyarakat setiap minggu dan memberikan bantuan materil dan non materil kepada masyarakat (Payong 2021).

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan, adapun persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji tentang hegemoni negara dan gotong royong masyarakat sebagai modal sosial dan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini hanya difokuskan untuk meneliti tentang kehadiran negara (hegemoni) melalui pemerintah desa pada program pembangunan desa dalam memberdayakan masyarakat atau justru melemahkan semangat gotong royong yang telah lama menjadi tradisi masyarakat Desa Kenotan.

METODE PENELITIAN

Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi

Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif berarti pembatasan masalah itu sendiri yaitu suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas (Anggitto, Albi & Setiawan, and Johan 2018). Fokus penelitian ini adalah Analisis Hegemoni Negara dalam Gotong Royong Masyarakat

untuk Pembangunan Desa di Desa Kenotan Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur dengan aspek yang diteliti adalah sebagai berikut: ada tiga tingkatan hegemoni yang dikemukakan Gramsci, yaitu hegemoni total (integral), hegemoni yang merosot (decadent), dan hegemoni yang minimum. Pada tiga tingkatan hegemoni ini peneliti akan memfokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam hal ini gotong royong masyarakat Desa Kenotan untuk pembangunan desa.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kenotan Kecamata Adonara Tengah

Kabupaten Flores Timur. Kecamatan adonara tengah merupakan satu dari sembilan belas (19) kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Ibu kotanya di Desa Lewobele. Luas wilayah 57,99 km² dan jumlah penduduk 11.339 jiwa.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan agar ditemukan informan yang dapat memberikan informasi kepada peniliti tentang semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa (Creswell 2002). Informan penelitian terdiri dari beberapa unsur, yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan	Jumlah	Kategori
Kepala Desa	1	Utama
Tuan Tanah (Suku Lewowerang)	1	Utama
Masyarakat	5	Utama
Kepala Suku (Uak Tukan, Mawar, Maran, Lewohoko, Lewolein)	5	Utama
Tokoh Masyarakat	2	Pendukung
Perangkat Desa	1	Pendukung
Jumlah	15	

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan, data sekunder berupa sejumlah keterangan, dokumen, gambar, catatan tertulis yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi/pengamatan secara langsung, wawancara/tanya jawab dengan informan, dan dokumen berupa foto, video, surat, dan catatan lainnya (Anggito, Albi & Setiawan, and Johan 2018).

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada teknik pengolahan data dan analisis data menurut Miles & Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menemukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Kemudian reduksi data, sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Selanjutnya penyajian data sebagai rangkaian organisasi informasi yang

memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Dan yang terakhir penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data penulis harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat (Anggito, Albi & Setiawan, and Johan 2018). Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Bentuk Hegemoni Negara Dalam Pembangunan Desa

Intervensi negara dalam Pembangunan desa Kenotan tampak nyata melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah desa yang mengatur, mengarahkan dan mengawasi proses pembangunan. Negara hadir melalui perangkat desa, regulasi, serta program-

program seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial dan pelatihan masyarakat. Bentuk hegemoni ini tidak hanya bersifat koersif (menggunakan aturan dan sanksi), tetapi juga melalui konsensus, dimana masyarakat secara sadar mengikuti arahan pemerintah karena telah menginternalisasi nilai-nilai pembangunan yang dibawa negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kenotan menyatakan bahwa: “pemerintah desa dalam rangka melaksanakan program pembangunan di desa kenotan selalu mengikuti pada aturan yang ada dimana setiap pelaksanaan program Pembangunan desa anggarannya bersumber dari dana desa dan hasil dari musyawarah rencana pembangunan (musrembang) desa yang telah disetujui bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Terbukti dengan terlaksananya program Pembangunan desa yaitu pada tahun 2022 melanjutkan program air bersih periode sebelumnya, tahun 2023 penggerjaan taluk dan semenisasi 4 titik lorong desa, namun pada tahun 2024 direncanakan Pembangunan Drainase namun belum terlaksana karena pasifnya keterlibatan masyarakat serta perencanaan jalan poros tengah kampung tahun 2025 yang sedang dalam proses perencanaan.”

Hal yang sama disampaikan oleh Aparat Desa (Kaur Pembangunan) yang menyatakan bahwa: “negara dalam keterlibatannya untuk pembangunan desa melalui regulasi dana desa memberikan dampak yang baik karena

anggaran dana desa untuk Pembangunan di desa kenotan pada periode pemerintah desa sekarang telah berjalan dari tahun 2022 yaitu program air bersih masuk kampung (menjalankan periode sebelumnya namun terkendala karena alat pompa air rusak), tahun 2023 penggerjaan taluk lewowerang dekat kantor desa serta semenisasi 4 titik Lorong desa (belangpuken ke ebang, belangpuken ke baolangu, riang rok ke petung puken, riang rok

ke riangba). Dilakukan juga perbaikan jalan menuju lewolein yang dananya bersumber dari HOK hasil dari penggerjaan taluk. Tahun 2024 alokasi dana penggerjaan drainase namun belum berjalan karena minimnya partisipasi masyarakat (namun dana tetap direkening), perencanaan pembangunan tahun 2025 yaitu semenisasi jalan poros Tengah kampung, perempatan baolango, perempatan SMA wuaone, jalan riangblolo. Negara hadir melalui

bantuan dana desa untuk membantu pemerintah desa mewujudkan pembangunan di desa Kenotan.”

Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh Tokoh Masyarakat I:

“Peran negara dari segi memberikan dana desa untuk membantu proses pembangunan di desa secara tujuannya memang baik, dan dalam kaitan terhadap budaya gotong royong masih tetap kuat. Dana desa sebenarnya tidak merubah prinsip gotong royong, dengan adanya sistem HOK dalam program pembangunan desa sedikit membantu ekonomi Masyarakat, namun sistem HOK ini juga memberikan dampak negatif terhadap budaya gotong royong Masyarakat desa kenotan karena prinsip budaya gotong royong artinya memberi diri untuk membangun lewotana (kampung/desa) secara cuma-cuma tanpa adanya upah/HOK. Masyarakat punya jiwa gotong royong yang kuat, contohnya swadaya masyarakat bangun jembatan waitete yaitu jembatan penghubung desa dan kebun warga, bahu membahu secara sukarela memberi diri dan beberapa sumbangan untuk perbaikan jembatan tersebut dan proses penggerjaan terjadi di luar pemerintahan. Dengan contoh yang ada ini secara garis besar menggambarkan bahwa budaya gotong royong diluar pemerintahan masih sangat kuat dijalankan oleh Masyarakat desa kenotan”.

Dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh Tuan Tanah (Suku Lewowerang):

“Negara hadir membantu masyarakat desa kenotan melalui pemerintah desa dengan memberikan bantuan berupa dana desa yang

dinamika gotong royong. Konsensus semu terbentuk karena masyarakat menerima

dikelola oleh pemerintah desa kenotan untuk kepentingan Pembangunan di lewo/kampung. Dana desa yang bertujuan untuk membantu memperlancar proses Pembangunan di desa kenotan pada dasarnya dijalankan oleh pemerintah desa dengan adanya penggerjaan Taluk, dan semenisasi jalan. Dalam proses penggerjaan Taluk dan semenisasi jalan tersebut, masyarakat desa kenotan turut berpartisipasi dengan sistem yang namanya gotong royong, akan tetapi karna penggerjaan Pembangunan desa bersumber dari dana desa jadi ada upah/HOK yang diterima oleh Masyarakat. Upah/HOK ini yang pada akhirnya mempengaruhi nilai semangat budaya gotong royong masyarakat desa kenotan dari yang secara sukarela menjadi dibayar”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan negara dalam Pembangunan desa yaitu pemberian dana desa sebagai wujud nyata negara hadir untuk membangun desa pada dasarnya sangat membantu pemerintah desa dan Masyarakat desa untuk mewujudkan Pembangunan desa kearah yang lebih baik. Negara (melalui pemerintah desa) menggunakan regulasi, anggaran dana desa, dan program pembangunan untuk mengarahkan masyarakat mengikuti visi pembangunan nasional. Namun dalam kaitan dengan budaya gotong royong Masyarakat desa kenotan yang pada hakikatnya adalah memberi diri secara sukarela tanpa mengharapkan upah, secara swadaya masyarakat berpartisipasi dalam penggerjaan Pembangunan di desa justru dengan adanya upah/HOK semakin melunturkan semangat budaya gotong royong Masyarakat. Program pembangunan yang bersumber dari pusat sering kali kurang memperhatikan struktur sosial lokal, termasuk program secara pasif, bukan karena keterlibatan penuh.

Tabel 2. RKPDesa dan Laporan Realisasi APBDesa Kenotan

No	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Target Anggaran Pertahun			Realisasi Anggaran Per Tahun		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Sub Bidang Perhubu	Penyelenggaraan Informasi publik desa	2.522.500	2.800.000	2.000.000	2.522.500	2.800.000	1.000.000

	ngan, Komuni kasi dan Informa tika	(pengadaan baliho APBDesa)						
2.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan Lanjutan air minum bersih desa	232.93 0.133			232.93 0.133		
		Pekerjaan taluk penahan hunian warga (Lewowerang)		78.796. 100			78.796. 100	
		Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air, sumur bor, dll)			77.109. 000			77.109 .000
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan umum dan tata ruang (belang pukeng -baolangu)		66.704. 575			66.704. 274	
		Pekerjaan umum dan tata ruang (belang pukeng – ebang)		62.250. 213			62.250. 213	
		Pekerjaan umum dan tata ruang (riang bao)		56.912. 025			56.912. 025	
		Pekerjaan umum dan tata ruang (riang rok – petung pukeng)		68.656. 650			68.656. 650	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (pembangunan Taluk penahan hunian warga)			81.978. 550			0
TOTAL			235.45 2.633	336.11 9.563	161.08 7.550	235.45 2.633	336.11 9.262	78.109 .000

Sumber: RKPDesa dan Laporan Realisasi APBDesa Kenotan Tahun 2022,2023,2024

Pada gambar tabel diatas menunjukkan rencana kerja program Desa Kenotan dan laporan hasil realisasi anggaran desa selama 3 tahun, bahwa negara melalui pemerintah desa masih memberikan dana desa untuk proses Pembangunan di desa kenotan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam wawancara diatas. murni dilandasi solidaritas, kekerabatan, dan kekeluargaan tanpa motif ekonomi atau politik. Namun, kini praktik gotong royong mulai diarahkan dan dijadwalkan oleh pemerintah desa, bahkan terkadang menjadi prasyarat untuk mendapatkan bantuan atau akses program Pembangunan. Hal ini menggeser makna gotong royong dari yang bersifat sukarela menjadi semi-formal dan

Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan

Tradisi gotong royong di Desa Kenotan yang dikenal dengan istilah gemohing mengalami perubahan seiring masuknya program-program negara. Dahulu, gemohing terkoordinasi oleh negara melalui pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kenotan menyatakan bahwa: “nilai-nilai budaya gotong royong masyarakat desa kenotan yang terbawa dari dulu (nenek moyang) masih ada dan masih dilanjutkan generasi sekarang, kami menyebutnya dengan istilah *gemohing* yaitu gotong royong bahu

membantu saling membantu antar sesama masyarakat desa yang membutuhkan dalam hal ini misalnya kematian, kerja kebun dan bakti sosial. Masyarakat juga masih memberikan swadaya nyata dalam membangun jembatan waitete yang rusak terkena banjir beberapa waktu silam. Segala sumber perbaikan jembatan waitete bersumber dari swadaya masyarakat. Ini bukti nyata bahwa gotong royong masyarakat desa kenotan masih ada hingga hari ini. Jika dalam Pembangunan Desa yang berhubungan dengan pemerintah desa, gotong royong masyarakat masih ada, masyarakat masih ikut berpartisipasi dalam Pembangunan desa contohnya pengerjaan pipa air dan semenisasi jalan. Pengerjaan pipa air, masyarakat secara swadaya turun membantu pemerintah desa dan partisipasi masyarakat sangat tinggi, dan untuk semenisasi jalan karna ada HOK/upah harian untuk pekerjaan tersebut diberikan juga kepada masyarakat namun karena sistemnya HOK jadi tidak semua masyarakat ikut terlibat.”

Disampaikan juga oleh Kepala Suku Ue Mawar dalam hasil wawancara: “kegiatan gotong royong (*gemohing*) di desa kenotan menjadi tradisi pada masa lalu hingga sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh generasi ke generasi, kegiatan gotong royong di desa banyak dilakukan tanpa adanya upah atau hok. Contohnya pembangunan balai desa pertama kali juga dilakukan melalui swadaya masyarakat tanpa adanya dana yang memadai/belum ada Dana Desa seperti sekarang ini. Kepala desa pertama, menginisiasi kegiatan tersebut dengan mengandalkan partisipasi masyarakat, dan berdirinya Balai Desa menjadi bukti swadaya masyarakat berkaitan tentang gotong royong.

Kemudian dalam wawancara bersama salah satu Masyarakat (*PM*), menyampaikan bahwa:

“Pandangan soal gotong royong masyarakat desa kenotan dalam hal pembangunan desa akhir-akhir ini berkurang karena imbas dari Pembangunan yang ada nilai HOKnya. Jika berbicara soal gotong royong, dulu itu gotong

Berkaitan dengan Pembangunan desa untuk pemerintah desa sekarang, saya kebetulan terlibat dalam proses pengerjaan taluk dekat kantor desa tahun 2023, yang mana pengerjaan tersebut ada HOKnya namun kami masyarakat sepakat untuk tidak mengambil dana HOK tersebut tetapi dialihkan untuk pembelian material guna perbaikan jalan menuju Dusun Lewolein. Keterlibatan masyarakat dalam pengerjaan taluk dari sudut pandang saya antusiasnya kurang, karena dengan sistem HOK tidak semua masyarakat terlibat. Artinya ada upah yang diberikan oleh pemerintah desa, jadi kalau berbicara dari segi gotong royong masyarakat melihat ada nilai HOK/uang/upah yang diperoleh, semangat untuk menggelekat lewo/ membangun lewotanah (desa) secara sukarela tidak ada lagi karena sudah diganti dengan nilai HOK.”

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Suku Maran dalam sebuah wawancara: “Budaya gotong royong di desa kenotan memiliki nilai-nilai sosialnya yang sangat kuat, tetapi pemerintah desa salah strategi sehingga mengakibatkan budaya gotong royong menjadi lemah. hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Masyarakat dalam proses pembangun desa. Masyarakat desa kenotan pada tahun-tahun sebelumnya sangat aktif dalam keterlibatan meraka dalam budaya gotong royong dikarenakan masyarakat dilibatkan langsung dalam setiap proses dan diatur dengan system yang saling menguntungkan antara Masyarakat dan pemerintah. Pemerintah desa kenotan dalam proses Pembangunan tidak ada keterbukaan dengan Masyarakat hal ini memicu terjadinya pro kontra antara pemerintah desa dan Masyarakat.”

royong kebanyakan dijalankan secara sukarela karena terpanggil untuk menggelekat/membangun lewotanah. Namun sekarang, karena adanya Dana Desa, nilai budaya gotong royong Masyarakat desa kenotan ikut berpatokan pada nilai uang. Seringkali jika Masyarakat terlibat dalam Pembangunan desa, Masyarakat bertanya dulu

apakah ada upahnya atau tidak? kalau ada upah maka Masyarakat ikut terlibat kerja, karena Masyarakat tahu bahwa system Pembangunan desa sekarang keuangannya bersumber dari dana desa. Sebenarnya dengan adanya upah ini membantu masyarakat dari segi ekonomi keluarga, namun kalau dari segi gotong royong memberi diri secara sukarela/swadaya itu sudah mulai berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya gotong royong Masyarakat desa kenotan masih tetap ada sampai sekarang. Dalam hal Pembangunan desa yang melibatkan partisipasi/gotong

royong Masyarakat masih tetap berjalan walaupun ada nilai atau upah yang diberikan oleh pemerintah desa atas kerja Masyarakat. Dari sisi budaya gotong royong Masyarakat desa kenotan yang pada dasarnya memberi diri secara sukarela, membantu secara swadaya Masyarakat pun masih tetap dilaksanakan oleh Masyarakat desa setempat. Dengan adanya dana desa dari negara, menurunkan makna/nilai dari gotong royong masyarakat desa kenotan yang mau bekerja untuk Pembangunan desa dengan nilai HOK/Upah yang diperoleh.



Gambar 1. Swadaya Masyarakat Desa Kenotan Memperbaiki Jembatan Waitete

Dampak Hegemoni Negara Terhadap Gotong Royong

Dampak positif dari kehadiran negara antara lain tersedianya infrastruktur yang lebih baik, dan adanya pengakuan formal terhadap kelompok-kelompok gotong royong. Namun, dampak negatif yang muncul adalah tergerusnya nilai-nilai tradisional gotong royong, munculnya ketergantungan pada bantuan negara, dan menurunnya inisiatif mandiri masyarakat. Beberapa warga menilai gotong royong sebagai kewajiban administratif, bukan lagi panggilan budaya atau solidaritas sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Suku Uak Tukan menyampaikan bahwa:

“kegiatan pembangunan desa dilihat dari adanya dana desa sangat membantu kami di desa kenotan karena pembangunan desa sudah ada bantuan dari negara berupa dana desa tersebut, jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi swadaya murni untuk pembangunan desa. Dari bantuan tersebut sudah ada pengerajan taluk dan semenisasi jalan di 4 titik lorong desa. Artinya dengan adanya dana desa sangat membantu kami di desa kenotan untuk pembangunan desa yang menjadi kebutuhan

lewo tanah/desa itu sendiri, secara tidak langsung negara juga punya perhatian untuk pembangunan desa. Negara memberikan bantuan itu karena mereka sangat mencintai kita punya lewo tanah/desa, namun saja kita di desa kenotan dalam hal ini pemerintah desa saya adalah belum adanya laporan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait penggunaan dana untuk Pembangunan desa. Dan besaran nilai HOK pun tidak didasari atas kesepakatan bersama.”

Disampaikan juga oleh Kepala Suku Lewolein dalam hasil wawancara:

“kehadiran negara dalam kegiatan pembangunan desa untuk membantu masyarakat ada dan dibuktikan dengan adanya bantuan dana dari pusat yakni dana desa, sehingga pada saat penggerjaan semenisasi jalan di 4 titik lorong dan taluk, masyarakat diberikan Hok/upah ke masing-masing masyarakat, ada juga penggerjaan semenisasi Lorong dusun III, upahnya diberikan kepada kelompok ibu-ibu dusun III untuk menambah kas kelompok. Adanya HOK ini membantu dari segi ekonomi namun menurunkan semangat gotong royong masyarakat karena hanya masyarakat dusun itu saja yang terlibat dalam proses Pembangunan di dusunnya, sedangkan masyarakat di dusun lain tidak terlibat karena sistem HOK tadi.”

Hasil wawancara bersama salah satu Masyarakat (*PE*), menyampaikan bahwa:

“jika kita melihat gotong royong dari sisi pemerintah desa berkaitan dengan Pembangunan desa, saat ini gotong royongnya semakin berkurang karena semua kegiatan di desa diukur dari nilai uang. Gotong royong seperti dulu yang dilakukan nenek moyang berkurang karena semua sekarang orientasi ke uang, jadi gotong royongnya melemah. Namun masih ada masyarakat yang mau bergotong royong tanpa mengharapkan uang misalnya penggerjaan pipa air yang mana untuk Pembangunan desa dan masyarakat tau bahwa ada penggunaan anggaran dana desa tapi tidak menuntut nilai hoknya. Jika gotong royong berhubungan dengan pemerintah desa maka semua berhubungan juga dengan uang, ini

mungkin dalam prosesnya belum tepat, sehingga tujuan yang bagus dan mulia untuk membangun lewo tanah/desa tidak tercapai karena dalam pelaksanaan mungkin aturannya belum terlalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, maksud membuat gotong royong ada tapi volumenya kecil. Ada juga contoh lainnya, waktu pembukaan jalan awal kerja semenisasi di dusun III masyarakat semua turun tanpa ada upah terlebih dahulu, saat penggerjaan semenisasi karena hitung HOK hanya yang dapat HOK saja yang kerja.”

Kemudian dalam wawancara bersama salah satu Masyarakat (*BW*), menyampaikan bahwa:

“sebelum adanya dana desa, masyarakat bahu membahu membangun desa seperti kerja taluk dalam kampung (waktu dulu) tidak ada semen hanya pakai batu dan tanah masyarakat tetap kerja walaupun tidak ada dana, kalau sekarang dengan adanya dana, masyarakat taunya kerja harus dibayar. Kalau kerja ikhlas untuk lewo/kampung asal jangan sebut anggaran, untuk sekarang kerja Taluk/Jalan/Lorong Desa sudah ada hoknya. Pemerintah desa sebelumnya masih tetap mempertahankan gotong royong dengan bangun balai desa dari swadaya murni masyarakat, sekarang balai desa sudah dibongkar untuk di rehap yang dilanjutkan periode berikutnya dengan menggunakan tukang dari orang desa kenotan, dan karna tukang di bayar jadi masyarakat tidak terlibat membantu. Kalau sekarang pembangunan desa dilimpahkan ke dusun-dusun, jadi hanya masyarakat dusun itu saja yang terlibat bekerja.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak hegemoni negara terhadap gotong royong Masyarakat desa kenotan cukup memberikan dampak besar dalam proses Pembangunan di desa kenotan. Ada dampak positif yaitu dengan adanya dana desa yang merupakan bantuan dari negara mendongkrak Pembangunan infrastruktur di desa, namun di sisi lain dampak negatifnya melemahkan nilai budaya

gotong royong Masyarakat desa kenotan karena diukur dari nilai uang/upah/hok.

Resistensi dan Adaptasi Masyarakat

Tidak semua masyarakat menerima perubahan ini secara pasif. Ada kelompok-kelompok yang berupaya mempertahankan nilai-nilai asli gemohing, misalnya dengan tetap melalukan gotong royong secara mandiri diluar agenda resmi desa. Namun, sebagian besar masyarakat cenderung menyesuaikan diri dengan pola baru yang diatur negara, baik karena kebiasaan, kebutuhan maupun kesadaran akan manfaat praktis dari program pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Suku Lewohoko menyampaikan bahwa:

“kalau kita bicara soal gotong royong ini adalah turun temurun, tetapi kita bicara soal nilai dari gotong royong itu sendiri lebih muncul urusan adat. Dalam urusan adat itu, keluarga-keluarga terkait melakukan patungan dihitung berdasarkan keturunan anak laki-laki. Ada juga gotong royong yang adalah nilai gemohing yang sampai sekarang masih dijalankan oleh masyarakat desa kenotan, contoh gemohing yang dilakukan salah satunya beberapa kelompok orang tua ataupun kelompok anak muda, mereka bersepakat untuk kerja kebun (*keriang ma'a*) dan belah tapo (*belah kelapa*) secara bergiliran di satu kebun ke kebun lainnya. Biasanya hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, mereka memberi bantuan tenaga secara cuma-cuma satu sama lainnya tanpa adanya upah.”

Hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat II:

“sebagai tokoh masyarakat, saya melihat bahwa budaya gotong royong yang ada di desa kenotan masih ada kerja yang berasal dari inisiatif Masyarakat sendiri, contohnya penerangan Lorong desa/lampu jalan di desa itu dari inisiatif Masyarakat, karena Masyarakat merasa peduli terhadap lewotanah. Adaptasi Masyarakat dengan bantuan dari pemerintah pusat pada dasarnya tidak ada

hambatan karena bantuan tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan Masyarakat, hanya sikap dari pemimpin desa yang melihat budaya gotong royong dan diukur dengan nilai upah.”

Hasil wawancara dengan Masyarakat (NC) menyampaikan bahwa:

“kami masyarakat sangat terbantu dengan adanya dana desa, kami hanya perlu memberikan tenaga kami untuk pembangunan desa, segala bentuk anggaran bersumber dari dana desa tersebut. Namanya *gelekat lewo tanaket* (membangun desa) harus memberi diri secara sukarela seperti yang dilakukan orangtua jaman dulu, hanya saja sekarang tidak semua masyarakat terlibat membangun *lewo* karena segala proses dihitung dengan nilai uang yang mana keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan tidak secara merata.”

Hasil wawancara dengan Masyarakat (PUM) menyampaikan bahwa:

“*tite ata lewo kenotan* (kami orang desa kenotan) untuk gelekat taan soga lewo tana (membangun angkat nama kampung) selalu kerja utamakan *lewo tanaket* (tanah kampung). Hadirnya negara dalam wujud pemerintah desa memberikan bantuan buat *tite* (kami) orang kenotan sebenarnya kalau dilihat dari tujuannya itu baik. Saya mencoba membandingkan Pembangunan desa dulu sebelum adanya dana desa dan setelah adanya dana desa. Jiwa gelekat lewotanah sangat melekat dengan tite orang kenotan dengan adanya rabat jalan, balai desa dan lainnya yang masih kokoh sampai sekarang yang mana merupakan hasil dari jiwa gelekat Masyarakat tadi. Untuk sekarang jiwa gelekat kepada Pembangunan desa semenjak adanya dana desa mulai melemah karena sudah diukur dari nilai uang.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat simpulkan bahwa Masyarakat desa kenoatan masih tetap menjalankan budaya gotong royong saling membantu antar sesama dan semangat jiwa membangun lewotanah yang masih melekat pada masyarakat. Dalam

kaitan dengan pembangunan desa yang merujuk pada dana desa memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membangun desanya dan masih tetap berupaya untuk menjalankan program pembangunan desa tersebut.

Pembahasan

Analisis Hegemoni Negara dalam Pembangunan Desa

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran negara dalam pembangunan Desa Kenotan tampak jelas melalui alokasi dana desa, regulasi, serta program pembangunan yang diinisiasi pemerintah desa. Secara praktis, kehadiran negara membawa dampak positif berupa peningkatan infrastruktur (jalan, talud, drainase, dan air bersih). Namun, dari perspektif teori Gramsci, proses ini tidak sekadar persoalan teknis, melainkan mekanisme hegemoni negara yang menginternalisasi nilai pembangunan kepada masyarakat.

Hegemoni negara bekerja melalui kombinasi koersi (aturan dan sanksi administratif) serta konsensus (kesediaan masyarakat mengikuti program pembangunan). Akan tetapi, konsensus ini lebih bersifat semu karena sebagian besar partisipasi masyarakat termotivasi oleh insentif berupa HOK. Dengan demikian, legitimasi negara dalam pembangunan desa tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran ideologis masyarakat, melainkan keterikatan pada insentif ekonomi. Fenomena ini sesuai dengan konsep *decadent hegemony* Gramsci, yaitu hegemoni yang rapuh karena tidak disertai internalisasi nilai secara mendalam.

Gotong Royong sebagai Modal Sosial yang Tergeser

Tradisi *gemohing* di Desa Kenotan, yang sejak lama berlandaskan solidaritas dan kekerabatan, kini mengalami pergeseran makna. Praktik gotong royong yang dulunya bersifat sukarela mulai berubah menjadi aktivitas semi-formal yang diarahkan oleh

pemerintah desa dan dikaitkan dengan pembayaran upah.

Analisis ini sejalan dengan pemikiran Fukuyama (1995) bahwa modal sosial merupakan sumber daya penting bagi keberlangsungan pembangunan (Effendi 2016). Jika gotong royong berubah menjadi aktivitas transaksional, maka energi sosial masyarakat untuk bekerja sama secara sukarela akan menurun, sehingga desa berpotensi kehilangan basis modal sosialnya. Hasil penelitian ini menguatkan temuan Payong (2021) yang menunjukkan bahwa *gemohing* tidak hanya berfungsi sebagai budaya kerja sama, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara politis dalam proses perebutan kekuasaan. Artinya, perubahan makna gotong royong bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga strategi hegemonik negara maupun elite lokal.

Dampak Hegemoni Negara terhadap Gotong Royong

Intervensi negara melalui dana desa membawa dampak ganda bagi masyarakat. Dari sisi positif, infrastruktur desa menjadi lebih baik, kesejahteraan sebagian warga meningkat, dan pemerintah desa memperoleh legitimasi formal. Namun, dampak negatif yang menonjol adalah semakin melemahnya nilai sukarela dalam *gemohing*, serta munculnya ketergantungan pada bantuan negara.

Beberapa warga menilai gotong royong kini lebih sebagai “kewajiban administratif” daripada “panggilan budaya.” Pergeseran ini menunjukkan bahwa orientasi material semakin mendominasi nilai kerja sama masyarakat. Kondisi ini konsisten dengan kritik Gramsci bahwa hegemoni dapat melemahkan kesadaran kritis masyarakat, karena nilai-nilai dominan negara diinternalisasi tanpa proses reflektif.

Resistensi dan Adaptasi Masyarakat

Walaupun sebagian besar masyarakat menerima pola baru gotong royong yang diatur

negara, masih terdapat resistensi berupa inisiatif swadaya di luar program resmi. Misalnya, pembangunan dan perbaikan jembatan Waitete dilakukan sepenuhnya melalui partisipasi masyarakat tanpa dana desa. Praktik ini menunjukkan bahwa nilai-nilai asli *gemohing* belum sepenuhnya hilang, tetapi bertransformasi menjadi bentuk resistensi kultural terhadap penetrasi negara.

Dalam perspektif Gramsci, resistensi ini dapat dipahami sebagai bentuk *counter hegemony* upaya masyarakat mempertahankan otonomi budaya dari dominasi negara. Namun, resistensi ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi gerakan kolektif yang konsisten. Sebagian besar masyarakat tetap menyesuaikan diri dengan logika negara karena melihat manfaat praktis dari dana desa.

Implikasi Teoritis dan Kebijakan

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa hegemoni negara dalam konteks pembangunan desa tidak sepenuhnya berhasil membangun konsensus yang organik. Hegemoni negara di Desa Kenotan lebih dekat pada bentuk *decadent hegemony*, karena walaupun pembangunan berjalan, semangat sukarela dalam gotong royong mengalami pelemahan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya model pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berbasis budaya lokal. Negara tidak boleh hanya memandang masyarakat desa sebagai objek penerima bantuan, tetapi harus memposisikan mereka sebagai subjek pembangunan. Integrasi kebijakan dengan kearifan lokal seperti *gemohing* dapat mengurangi risiko ketergantungan, memperkuat modal sosial, dan memastikan pembangunan desa lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kehadiran negara melalui pemerintah desa di Desa Kenotan terlihat nyata melalui dana desa, regulasi, dan program

pembangunan. Intervensi ini berkontribusi pada peningkatan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat, namun sekaligus menjadi instrumen hegemoni negara dalam membentuk arah pembangunan desa. Tradisi gotong royong (*gemohing*) masih bertahan, tetapi mengalami pergeseran makna. Dari kerja sukarela yang berbasis solidaritas, gotong royong kini sebagian besar berubah menjadi aktivitas semi-formal yang dikaitkan dengan insentif berupa HOK. Pergeseran ini menunjukkan melemahnya modal sosial yang sebelumnya menjadi kekuatan utama masyarakat desa. Hegemoni negara dalam pembangunan desa lebih dekat pada kategori *decadent hegemony* (Gramsci), karena walaupun negara berhasil memperoleh legitimasi, konsensus masyarakat lebih didorong oleh motif ekonomi daripada kesadaran ideologis. Hal ini menimbulkan konsensus semu yang rapuh. Dampak positif kehadiran negara adalah tersedianya infrastruktur yang lebih baik dan meningkatnya kapasitas pembangunan desa. Dampak negatifnya adalah melemahnya nilai gotong royong sukarela, munculnya ketergantungan pada negara, serta kurangnya inisiatif mandiri masyarakat. Resistensi masyarakat terhadap dominasi negara masih ada, terlihat dari praktik swadaya seperti perbaikan jembatan Waitete. Hal ini membuktikan bahwa *gemohing* tetap hidup, meskipun mulai bergeser dalam konteks pembangunan yang diformalkan negara.

SARAN

Bagi Pemerintah Desa: perlu merancang program pembangunan yang benar-benar partisipatif dan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Dana desa sebaiknya tidak sekadar membiayai pembangunan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali nilai gotong royong dengan memberi ruang bagi kerja sukarela masyarakat.

Bagi Masyarakat Desa Kenotan: penting untuk terus mempertahankan praktik *gemohing* dalam berbagai aspek kehidupan sosial, agar modal sosial tidak sepenuhnya tergantikan oleh logika transaksional. Gotong

royong harus tetap dipandang sebagai identitas budaya, bukan sekadar kewajiban administratif.

Bagi Pemerintah Pusat: kebijakan dana desa sebaiknya diselaraskan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal. Program pembangunan perlu diarahkan agar memperkuat kohesi sosial, bukan melemahkan solidaritas.

Bagi Akademisi/Peneliti Selanjutnya: penelitian dapat diperluas dengan membandingkan berbagai desa di Flores Timur atau wilayah lain, untuk melihat variasi dalam interaksi antara hegemoni negara dan budaya lokal. Hal ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana pembangunan desa memengaruhi modal sosial di Indonesia.

Alfabeta.

Zaenudin Ali, Zezen. 2017. "Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) Di Italia." *Yaqzhan*. Vol. 3. <Http://Www.Fisipunsil.blogspot.com/2013/05/bentuk-bentuk-pemerintahan-negara-dan-teorinya.html>.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi & Setiawan, and Johan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design : Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press.
- Effendi, Tadjudin Noer. 2016. "Budaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat Ini." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23403>.
- Nezar, Patria, and Arief Andi. 2003. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Payong, O. Daluamang. 2021. "Politik Gemohing : Instrumen Meraih Kekuasaan Politik Di Kabupaten Flores TimuR." *Journal Of Indonesian Rural And Regional Government (Jirreg)* 5.
- Ridwan, Isman. 2019. "Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih: Pasang Surut Kekuasaan Adat Di Tengah Hegemoni." *Jurnal Niara* 12 (1): 1–8.
- Siswati, Endah. 2017. "Anatomii Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Jurnal Translitera* 5.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: